

**RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUWU UTARA  
2017**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LUWU UTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Ke Hadirat Allah SWT Karena atas Limpahan Rahmat dan Hidayahnya, Penyusunan RENJA Satuan Kerja (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dapat Diselesaikan.

Rencana Kerja ini Memuat , Program dan Kegiatan dalam Kurun Waktu 1 (Satu) tahun ke Depan, dengan Sasaran Untuk Meningkatkan Pelayanan Melalui Sistem Peningkatan Aparat DPMD dan Aparat Desa, Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Desa, Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Program Pemberdayaan Serta Pendayagunaan Potensi Desa Melalui Pembangunan Desa.

Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Segala Aspek Kegiatan Pembangunan yang Berbasis Kemandirian Desa yang Akan Berdampak terhadap Kepedulian Masyarakat untuk Mengenal diri dan Lingkungannya dalam Merumuskan Pembangunan Secara Mandiri.

Rencana Kerja ini Merupakan Rencana yang akan Dijadikan Barometer Sebagai Acuan dan Pedoman Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Berdasarkan Arah Kebijakan dan Skala Prioritas yang Telah Ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Akan Dijadikan Acuan Dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan Satu Tahun Kedepan.

Masamba, 31 Januari 2017  
Kepala Dinas PMD

  
Drs. MISBAH  
Pkt : Pembina Tk. 1  
Nip.19670405 199710 1 001

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kegiatan Berdasarkan Fungsi Pelayanan Berdasarkan Renstra Tahun 2016 – 2021	7
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
<b>BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	20
3.3. Program dan Kegiatan	23
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>26</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang didasarkan pada Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016 - 2021 di jabarkan lebih lanjut melalui Renstra SKPD dan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya yang memuat Program dan Kegiatan prioritas dan usulan – usulan dari para pemangku kepentingan

Tahun 2017 merupakan tahun kedua transisi Perencanaan Pembangunan Daerah dari RPJMD 2010-2015. Akan tetapi mengisi kekosongan acuan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD maka RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 tetap merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi acuan, berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 adalah Program dan Kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan.

Tahun 2017 ini adalah tahun kedua Priode Pelaksanaan Renstra tahun 2016- 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2016 dimana capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2016 masing-masing sebesar 52,09% dan 85,80% dari yang semestinya 100% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah TINGGI Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2011 s.d 2015 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut masing-masing telah mencapai 79,54% dan 75,83% dari yang semestinya 80% untuk tahun ketiga RPJMD dan Renstra DPMD dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah TINGGI Dan dari capaian tersebut total 29 kegiatan yang ada , jumlah kegiatan yang terlaksana berdasarkan target antara lain Rendah 1 (satu) atau 6,25% , sesuai/tercapai 13 atau 81,25% yang melebihi target tidak ada

sementara masih terdapat dua kegiatan yang di programkan dalam rencana kerja tidak dapat dilaksanakan hal ini karena keterbatasan anggaran.

Renja ini merupakan dokumen Perencanaan yang memuat tentang program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA, serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

## **I.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2020.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);

### **I. 3. Maksud dan Tujuan**

#### **I.1.1. Maksud :**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

#### **I.1.2. Tujuan :**

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat
- b. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017.
- c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- d. Untuk menggambarkan proyeksi pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- e. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

#### **I. 4. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
- 3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. PENUTUP**

**BAB. II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUT COME DAN OUT PUT		KRITERI CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
	(100%) ) 2016 (%)	(80%) 2016- 2021 (%)	2016	2016- 2021	JUMLAH KEGIATAN	REND AH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELE-BIHI TARGET (%)	TDK TERLAK-SANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DPMD	61.85	109.39	Tinggi	Sangat Tinggi	24	0	24	0	0	
	97.32	95.05			0	4.17	95,83	0	0	Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tabel 2.1 Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khusus tahun 2016 masing-masing sebesar 61,85% dan 97,32% dari yang semestinya 100% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah **TINGGI** Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2016 s.d 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut masing-masing telah mencapai 61,85% dan 109,39% dari yang semestinya 80% untuk tahun ke 4 RPJMD atau Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah **SANGAT TINGGI** Dan dari capaian tersebut total 24 kegiatan yang ada , jumlah kegiatan yang terlaksana berdasarkan target antara lain sesuai/tercapai 23 atau 95,83% yang melebihi target tidak ada

sementara masih ada beberapa kegiatan yang di programkan dalam rencana kerja tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat di Lihat pada tabel berikut:

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

### 2.2.1. Indikator Kinerja Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengaju ke Renstra 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi pada Publik	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Terwujudnya Laporan Kinerja administrasi Pemerintahan yang Transparan dan dapat diakses oleh Publik	Status Laporan Kinerja Baik	D	D	C	B	A	A	A
3	Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	7 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi
4	Berkembangnya Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan antar Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok binaan Pemberdayaan Masyarakat	1000 KLP	1200 Klp	1500 Klp	1971 Klp	2000 Klp	2500 Klp	2500 Klp
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	7 KLP	8 KLP	8 KLP	8 KLP	9 Klp	9 Klp	9 Klp
6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparat DMPD	Persentase Kualitas SDM Aparat DMPD	Belum Survei	Belum Survei	Belum Survei	Belum Survei	50%	80%	80%



	berdasarkan data potensi yang akurat	data Potensi yang Akurat							
17	Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada.	jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada	0	6 Desa	8 Desa	30 Desa	50 Desa	100 Desa	100 Desa

### 2.2.2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Pada tahun 2017, alokasi anggaran Belanja Langsung untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 4.898.000.000,- dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET 2016	CAPAIAN 2016
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi pada Publik	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat
2	Terwujudnya Laporan Kinerja administrasi Pemerintahan yang Transparan dan dapat diakses oleh Publik	Status Laporan Kinerja Baik	A,B,C,D,E	D	A	CC
3	Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	Organisasi	7 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi
4	Berkembangnya Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan antar Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok binaan Pemberdayaan Masyarakat	KLP	1000 KLP	2500 Klp	2500 Klp
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	KLP	7 KLP	9 Klp	9 Klp
6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparat DPMD	Tingkat Kepuasan Aparat Desa terhadap Pelayanan DPMD		Belum Survei	80%	Belum Survei
7	Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas PMD	Jumlah Aparat yang telah mengikuti Bimtek Pemberdayaan Masyarakat	Orang	1 Orang	10 Orang	10 orang

8	Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa dan kelurahan	Angka rata-rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Pendidikan S1 per Desa	%	35%	80%	80 %
9	Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan computer	Jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan komputer.	Orang	20 Orang	85 Orang	85 orang
10	Meningkatnya Efektifitas fungsi dan peran LKMD	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi LKMD	%	5%	70%	51,90 %
11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan melalui wadah LKMD	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan dari Masyarakat	Usulan	80 Usulan	110 Usulan	110 Usulan
12	Meningkatnya fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007	Jumlah Kepala desa, bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan	Orang	50 Kepala Desa	40 Bendahara	40 Bendahara
13	Teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin	Jumlah penurunan jumlah keluarga miskin	Jiwa	46.800 Jiwa	25.150 Jiwa	25.150 Jiwa
14	Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	Orang	25 Orang	35 Orang	35 Orang
15	Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang memiliki data potensi yang akurat	Jumlah desa yang memiliki data potensi	Desa	0	150 Desa	150 Desa
16	Tersusunnya Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) berdasarkan data potensi yang akurat	Jumlah desa yang telah menyusun RPJM-Desa Berdasarkan data Potensi yang Akurat	Desa	100 Desa	166 Desa	166 Desa
17	Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada.	jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swadaya	Desa	0	100 Desa	100 Desa

Melihat tabel sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik dimana proses laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP, target dan capaian kinerja 2016 telah dilaksanakan dengan tepat.
- b. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik dengan status laporan kinerja kategori BAIK dimana target dan capaian kinerja berpredikat CC.
- c. Sasaran Strategis Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat dengan Indikator Yaitu Jumlah Organisasi Masyarakat Pada Tahun 2016 Target 8 Organisasi dengan Capaian 8 Organisasi.
- d. Sasaran Strategis Perkembangan Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan Antar Kelompok Masyarakat dengan Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Binaan Tahun 2016 Target 2500 Kelompok dengan Capaian 2500 Kelompok.
- e. Sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dengan Indikator Jumlah Kelompok Masyarakat yang Ikut dalam Musrembang Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2016 Target 8 Kelompok dengan Capaian 8 Kelompok.
- f. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Dinas PMD dengan Indikator Tingkat Kepuasan Aparat Desa terhadap Pelayanan DPMD Tahun 2016 Target dan Sasaran Belum disurvei.
- g. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas PMD dengan Indikator Jumlah Aparat yang Telah Mengikuti Bimtek Tahun 2016 Target 10 orang dengan Capaian 10 Orang.
- h. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Angka Rata - Rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Kualifikasi Pendidikan S.I.
- i. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer dengan Indikator Jumlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer Tahun 2016, Target 80 Orang dengan Capaian 28 Orang.
- j. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran LKMD dengan Indikator Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi LKMD Tahun 2016 yakni 37% dengan Capaian 32 %.

- k. Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan dan Kemasyarakatan Melalui Wadah LKMD dengan Indikator Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan dari Masyarakat Pada Tahun 2016 Yakni 88 Usulan dengan Capaian 15 Usulan.
- l. Sasaran Strategis Meningkatnya Fungsi BPD Sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007 dengan Indikator Jumlah Kepala Desa, Bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan Pada Tahun 2016 Target 60 Kepala Desa, 30 Bendahara dengan Capaian 60 Kepala Desa dn 30 Bendahara.
- m. Sasaran Strategis Teridentifikasinya Penurunan Prosentase jumlah Keluarga Miskin dengan Indikator Jumlah Penurunan Keluarga Miskin Pada Tahun 2016 yakni 33.250 Jiwa.
- n. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Keluarga yang dapat Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga dengan Indikator Jumlah Keluarga yang Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga Pada Tahun 2016 yaitu 30 Orang dengan Capaian 25 Orang.
- o. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa dan kelurahan yang memiliki data Potensi Desa yang Akurat dengan Indikator Jumlah Desa yang Memiliki Data Potensi Pada Tahun 2016 Target 6 desa dengan Capaian 6 Desa.
- p. Sasaran strategis Tersusunnya Rencana Pembangunan Desa (RPJM-Desa) berdasarkan Data Potensi yang Akurat dengan Indikator Jumlah Desa yang telah Menyusun RPJMD – Desa Berdasarkan data Potensi Desa Pada Tahun 2016 Target 166 Desa dengan Capaian 166 Desa.
- q. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mencapai Tingkat Perkembangan Swadaya , Swakarsa dan Swasembada dengan Indikator Jumlah Desa dan Kelurahan yang mencapai tingkat Perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada Pada Tahun 2016 Target 8 Desa Swadaya dengan Capaian 9 Desa Swasembada.

### **2.2.3. Program dan Kegiatan 2017**

#### **1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pagu Anggaran Rp. 2.998.000
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.12.000.000

- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 4.000.000
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pagu Anggaran Rp. 9.600.000
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Pagu Anggaran Rp. 5.000.000
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Pagu Anggaran Rp. 9.965.000
- g. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Pagu Anggaran Rp 243.000.000
- h. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset Pagu Anggaran Rp. 332.410.000

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp. 40.000.000
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 89.150.000
- c. Pengadaan mebeleur Rp. 24.540.000
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 19.010.000
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 15.000.000
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 10.000.000

## **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**

- a. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan pagu Anggaran Rp. 107.000.000

## **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian**

### **Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu Anggaran Rp. 21.500.000

## **5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan**

- a. Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat Atas/Unit terkait pagu Anggaran Rp. 48.000.000

## **6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**

- a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Rp. 359.508.500,-
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Rp. 235.459.750,-

**7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan**

- a. Fasilitasi Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Rp. 976.054.000,-
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 297.420.000

**8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

- a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa Rp. 301.863.000
- b. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Rp. 46.052.500

**9. Program Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa**

- a. Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan desa Rp. 377.471.000,-
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Rp. 97.530.000
- c. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Rp. 199.733.750,-

**10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

- a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 257.050.000,-
- b. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Rp. 96.440.000,-
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 360.244.500,-

**11. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**

- a. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Rp. 300.000.000,-

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**a. Tugas Pokok**

Berdasarkan PERDA Nomor 47 Tahun 2008 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara mempunyai Tugas pokok dan Struktur Organisasi yang sangat Strategis Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kesekretariatan Dinas.

**b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan Dalam Bidang Pemerintahan Desa.
2. Pelayanan Dalam Bidang Kelembagaan Desa, termasuk Kelembagaan Masyarakat.
3. Pelayanan Dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pelayanan Dalam Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2014, Berbagai isu – isu penting yang berkembang. Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditinjau dari Tugas Pokok dan Fungsi, Berbagai isu – isu penting yang berkembang antara lain :

1. Kemiskinan dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Efektifitas Fungsi dan Kelembagaan Pemerintah Desa.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Tuntutan Demokratisasi Dalam Penyelenggaraan Pilkadaes. Pemekaran Desa.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki yang ada masih sangat terbatas dalam mendukung pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien khususnya

kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat khususnya untuk menjangkau daerah-daerah terisolir.

#### 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan awal RKPD akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dapat di Lihat pada tabel berikut :

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat belum dimasukkan kedalam rencana kerja karena belum ada jadwal pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

#### USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017 KABUPATEN LUWU UTARA

NO	Program dan kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6



### **BAB. III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri dirumuskan sebagai berikut :

#### **Visi**

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan yang Desentralistik, Sistem Politik yang Demokratis, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Wadah Negara kesatuan Republik Indonesia”.

#### **Misi**

Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Upaya:

1. Memelihara dan Memanfaatkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
3. Memantapkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Desentralistik.
4. Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Auditabel.
5. Memantapkan Sistem Politik dalam Negri yang Demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik.
7. Mengembangkan Keserasian Hubungan Pusat – Daerah antar Daerah dan antar Kawasan, Serta Kemandirian dalam Daerah.
8. Pengelolaan Pembangunan Serta Berkelanjutan dan Berbasis Kependudukan.

Kebijakan Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi dasar untuk mengadaptasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di rumuskan program strategis untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi DPMD

Kabupaten Luwu Utara yaitu program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas Aparat Desa dan kelembagaan Desa.

Program tersebut diatas kemudian diharmonisasi dengan program pemberdayaan Propinsi Sulawesi Selatan, melalui sinkronisasi program. Hal ini dimaksudkan dengan percepatan dan penanggulangan kemiskinan sejalan dengan program propinsi masih mencakup hal kebijakan Nasional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan strategis.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara :**

##### **1. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Kesatu**

Meningkatkan Kompetensi Aparat Dinas PMD, Aparat Desa, Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat desa dalam bidang pemerintahan desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparat Dinas PMD.
  2. Meningkatnya kemampuan aparat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 40 % menjadi 100%.
  2. Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa 40 % menjadi 100%.
- 2) Meningkatkan skill aparat desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/kemampuan mengoperasikan komputer dari 40 % menjadi 100%.
  2. Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa dalam penyelenggaraan administrasi 40 % menjadi 100%.
- 3) Meningkatkan disiplin dan budaya kerja aparat desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya disiplin aparat desa dalam melaksanakan tugas dari 40 % menjadi 100%.
2. Meningkatnya etos kerja dan produktifitas aparat desa 40 % menjadi 100%.

## **2. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Kedua**

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa, Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan Efektifitas Fungsi dan Peran lembaga ketahanan Masyarakat desa (LKMD).

Sasaran :

1. Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran LKMD dari 40 % menjadi 100%.
  2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan melalui wadah LKMD dari 50 % menjadi 100%.
- 2) Meningkatkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai peraturan perundang-undangan.

Sasaran :

1. Meningkatnya Fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda No. 8 Tahun 2007 dari 40% menjadi 100%.
2. Meningkatnya Koordinasi dan Harmonisasi antara BPD dengan kepala desa dari 50% menjadi 100%.

- 3) Meningkatkan Pengetahuan serta wawasan anggota LKMD dan BPD sesuai tugas Pokok dan fungsinya.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pengetahuan serta Wawasan Anggota LKMD dan BPD yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang tugasnya dari 40% menjadi 100%.

### 3. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Ketiga.

Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan, Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

- 1) Meningkatkan daya beli masyarakat serta menurunnya jumlah keluarga miskin.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah masyarakat di pedesaan yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dari 80% menjadi 100%.
2. teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin dari 30 % menjadi 100%.

- 2) Bertambahnya jumlah Rumah tangga yang memiliki Usaha Ekonomi Industri rumah tangga.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangkan usaha/industri Rumah Tangga dari 20% menjadi 100%.

### 4. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Keempat

Pendayagunaan Potensi Desa Melalui Pengembangan Desa. Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

- 1) Menyediakan data potensi desa yang akurat dalam perencanaan pembangunan desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah desa yang memiliki data potensi yang akurat dari 50% menjadi 100%.

2. Tersusunnya Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) berdasarkan data potensi yang akurat dari 40% menjadi 100%.
- 2) Menyediakan data potensi desa untuk mengukur tingkat perkembangan desa.

Sasaran :

2. Meningkatnya jumlah desa yang mencapai tingkat perkembangan dari Kurang Berkembang, Lamban Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang dari 30% menjadi 50%.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Program kerja operasional sebagai implimentasi kebijakan yang ditetapkan. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

#### **a. Program**

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional
  4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  5. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
  6. Penyediaan Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-undangan
  7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  8. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawian, Ketatausahaan dan Aset.
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  3. Pengadaan mebeleur
  4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaran dinas operasional

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  1. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Peningkatan Pelayanan Kedinasan
  1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/WakilBupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas /Unit Kerja Terkait
- f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
  2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
- g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
  1. Fasilitasi Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
  2. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
- h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes
  2. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan
- i. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa
  2. Pelaksanaan musyarakat pembangunan desa
  3. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
- j. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  1. Pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
  2. Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen Pemerintahan desa
  3. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

**k. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

**1. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha Ekonomi Produktif**

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan sebagai implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Kerja tahunan ( Renja ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang didasarkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2021. Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang Program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA, serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Masamba, 2017  
Kepala Dinas PMD

  
**Drs. MISBAH**  
Pkt : Pembina Tk. I  
Nip.19670405 199710 1 001

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi pada Publik	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	
2	Terwujudnya Laporan Kinerja administrasi Pemerintahan yang Transparan dan dapat diakses oleh Publik	Status Laporan Kinerja Baik	A,B,C,D,E	D	A	
3	Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	Organisasi	7 Organisasi	8 Organisasi	
4	Berkembangnya Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan antar Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok binaan Pemberdayaan Masyarakat	KLP	1000 KLP	2500 Klp	
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	KLP	7 KLP	9 Klp	
6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparat BPMPD	Tingkat Kepuasan Aparat Desa terhadap Pelayanan BPMPD		Belum Survei	80%	
7	Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Badan PMPD	Jumlah Aparat yang telah mengikuti Bimtek Pemberdayaan Masyarakat	Orang	1 Orang	10 Orang	
8	Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa dan kelurahan	Angka rata-rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Pendidikan S1 per Desa	%	35%	80%	
9	Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan computer	Jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan komputer.	Orang	20 Orang	85 Orang	
10	Meningkatnya Efektifitas fungsi dan peran LKMD	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi LKMD	%	5%	70%	

11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan melalui wadah LKMD	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan dari Masyarakat	Usulan	80 Usulan	110 Usulan	
12	Meningkatnya fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007	Jumlah Kepala desa, bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan	Orang	50 Kepala Desa	40 Bendarahara	
13	Teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin	Jumlah penurunan jumlah keluarga miskin	Jiwa	46.800 Jiwa	25.150 Jiwa	
14	Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangk-an usaha / industri Rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	Orang	25 Orang	35 Orang	
15	Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang memiliki data potensi yang akurat	Jumlah desa yang memiliki data potensi	Desa	0	150 Desa	
16	Tersusunnya Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) berdasarkan data potensi yang akurat	Jumlah desa yang telah menyusun RPJM-Desa Berdasarkan data Potensi yang Akurat	Desa	100 Desa	166 Desa	
17	Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada.	jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swadaya	Desa	0	100 Desa	

**TABEL 5**  
**RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 07 2 07 01 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang dilaksanakan</b>			<b>622,973,000</b>				<b>622,973,000</b>	
2 07 2 07 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim/Masuk Selama 1 Tahun	Kab. Luwu Utara	1,500	Pucuk Surat	2,998,000	APBD	1,500	Pucuk Surat	2,998,000
2 07 2 07 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Tersedianya Sarana Komunikasi Internet	DPMD	1	Tahun	12,000,000	APBD	1	Tahun	12,000,000
2 07 2 07 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas	DPMD	1	Tahun	4,000,000	APBD	1	Tahun	4,000,000
2 07 2 07 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Clening Service	DPMD	10 dan 1	Jenis dan Cleaning Service	13,600,000	APBD	10 dan 1	Jenis dan Cleaning Service	13,600,000
2 07 2 07 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah instalasi Listrik	DPMD	20	Jenis	5,000,000	APBD	20	Jenis	5,000,000
2 07 2 07 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Biaya Tagihan Surat kabar /Majalah dan Buku Peraturan Perundang- Undangan	DPMD	16	Jenis	9,965,000	APBD	9	Jenis	9,965,000
2 07 2 07 01 01 18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Aparat yang Mengikuti Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah	Kab Luwu Utara dan Luar daerah	44	Orang	243,000,000	APBD	1	Tahun	243,000,000
2 07 2 07 01 01 19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset	Jumlah Laporan / Dokumen	Kab. Luwu Utara	12	Dokumen	332,410,000	APBD	17	Dokumen	332,410,000
2 07 2 07 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya sarana dan Prasarana bagi Aparatur untuk mendukung Peningkatan Kinerja</b>				<b>193,700,000</b>				<b>193,700,000</b>
2 07 2 07 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional roda Dua yang diadakan	DPMD	2	unit	40,000,000	APBD	1	unit	40,000,000
2 07 2 07 01 02 09	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	DPMD	7	Jenis	89,150,000	APBD	7	Jenis	89,150,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2 07 2 07 01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Peralatan Dinas yang di pelihara	DPMD	2	Jenis	24,540,000	APBD	2	Jenis	24,540,000
2 07 2 07 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPMD	1	Gedung	15,010,000	APBD	1	Gedung	15,010,000
2 07 2 07 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang di pelihara	DPMD	2	Jenis	15,000,000	APBD	2	Jenis	15,000,000
2 07 2 07 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Gedung dan Peralatan kantor	DPMD	5	Jenis	10,000,000	APBD	5	Jenis	10,000,000
2 07 2 07 01 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Terciptanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>107,000,000</b>				<b>107,000,000</b>
2; 07 2 07 01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang Mengikuti Bimtek	Kab Luwu Utara dan Luar daerah	44	PNS	107,000,000	APBD	44	PNS	107,000,000
2 07 2 07 01 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan DPMD</b>				<b>21,500,000</b>				<b>21,500,000</b>
2 07 2 07 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	DPMD	2	Dokumen	21,500,000	APBD	2	Dokumen	21,500,000
2 07 2 07 01 09	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasaan</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kedinasaan</b>				48,000,000				48,000,000
2 07 2 07 01 09 01	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati.DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kedinasaan	DPMD	173	desa/Kel	48,000,000	APBD	173	Des/Kel	48,000,000
2 07 2 07 01 15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Efektifitas Kinerja kelembagaan Masyarakat Desa</b>				<b>594,968,250</b>				<b>594,968,250</b>
2 07 2 07 01 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga Organisasi Masyarakat	Kab. Luwu Utara	53	Lembaga adat	359,508,500	APBD	53	embaga Ad	359,508,500
2 07 2 07 01 15 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Pesrta Pelatihan Tugas dan Fungsi LKMD/LPMD atau Sebutan Lain	Kab. Luwu Utara	30	Profil desa/LPM	235,459,750	APBD	30	Profil desa/LPM	235,459,750

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 07 2 07 01 16	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa</b>			<b>1,273,474,000</b>				<b>1,273,474,000</b>
2 07 2 07 01 16 06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Jumlah Kelompok UEM	Kab. Luwu Utara	166 Desa	976,054,000	APBD	166	Desa	976,054,000
2 07 2 07 01 16 07	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Luwu Utara	1 kali Desa	297,420,000	APBD	166	Desa	297,420,000
4 04 2 07 01 17	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>			<b>347,915,500</b>				<b>347,915,500</b>
4 04 2 07 01 17 01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Kab.Luwu Utara	166 Desa	301,863,000	APBD	166	Desa	301,863,000
4 04 2 07 01 17 03	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Kab.Luwu Utara	200 Buku	46,052,500	APBD	200	Desa	46,052,500
2 07 2 07 01 17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>Efektifitas Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa</b>			<b>674,734,750</b>				<b>674,734,750</b>
2 07 2 07 01 17 01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan masyarakat pembangunan Desa	Kab. Luwu Utara	12 Desa	377,471,000	APBD	12	Desa	377,471,000
2 07 2 07 01 17 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang melaksanakan musrenbang	Kab. Luwu Utara	166 Desa	97,530,000	APBD	166Desa	Desa & Kelurahan	97,530,000
2 07 2 07 01 17 03	Pemberian Stimulan Pembanguin Desa	Jumlah Desa	Kab. Luwu Utara	30 Desa	199,733,750	APBD	30	Desa	199,733,750
2 07 2 07 01 18	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>			<b>713,734,500</b>				<b>713,734,500</b>
2 07 2 07 01 18 02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang telah mengikuti Pelatihan	Kab. Luwu Utara	166 Desa	257,050,000	APBD	166	Desa	257,050,000
2 07 2 07 01 18 03	Pelatihan Aparatur pemerintah Desa dalam Bidang manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang telah mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan Desa	Kab. Luwu Utara	166 Desa	96,440,000	APBD	166	Desa	96,440,000
2 07 2 07 01 18 04	Monnitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Luwu Utara	166 Desa	360,244,500	APBD	166	Desa	360,244,500

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2 07 2 07 01 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di pedesaan	Peran Perempuan di pedesaan			300,000,000				300,000,000	
2 07 2 07 01 19 01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan Yang Mengikuti pelatihan usaha ekonomi produktif	Kab. Luwu Utara	1 laporan	Sosialisasi & Pelatihan	300,000,000	APBD	1 laporan	Sosialisasi & Pelatihan	300,000,000
	<b>JUMLAH</b>					<b>4,898,000,000</b>				<b>4,898,000,000</b>

Masamba, 31 Januari 2017

